



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram
Kode Post : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020**



Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram
Telepon /Fax : (0370) 7502424/ (0370) 7502992
Kode Pos : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melancarkan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan khususnya Penetapan Kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Provinsi NTB Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 yang selanjutkan telah dibuatkan peraturan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB.

Pada akhirnya, kami mengharapkan LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2020 tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja tetapi dapat memberi manfaat yang optimal bagi upaya perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas serta pelayanan publik yang berkesinambungan di RSUD Provinsi NTB.

Mataram, Januari 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196306231988032007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM	2
1. Sejarah singkat RSUD Provinsi NTB	2
2. Tugas RSUD Provinsi NTB	3
3. Fungsi RSUD Provinsi NTB	4
4. Kepegawaian	4
5. Struktur Organisasi RSUD Provinsi NTB	9
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. PERENCANAAN	11
1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RSUD PROVINSI NTB..	11
B. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSUDP NTB 2019 – 2023	12
1. Strategi	12
2. Kebijakan	13
3. Indikator Kinerja Utama	16
C. PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja 2020	21
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	21
3. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target Dalam RPJMD.....	22
4. Perbandingan capaian indikator kinerja dengan target nasional.....	23
5. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta solusi alternatif	24
6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya.....	25
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	27
B. REALISASI ANGGARAN	30
1. Realisasi anggaran berdasarkan PK Tahun 2020	30
C. PENGHARGAAN ATAS KINERJA OPD	33
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis PD	
2. Indikator Kinerja Utama SKPD	
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
5. Pengukuran dan pencapaian kinerja SKPD Tahun 2020	
6. Foto penghargaan yang diterima OPD atas nama Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020	
7. Laporan Realisasi Anggaran 2020	
8. Struktur Organisasi	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB menurut status kepegawaian dan jenis kelamin tahun 2020.
- 1.2 Distribusi PNS RSUD Provinsi NTB menurut jenis jabatan dan jenis kelamin tahun 2020
- 1.3 Distribusi SDM Fungsional RSUD Provinsi NTB tahun 2020
- 1.4 Rincian Dokter Spesialis Pemangku Jabatan Fungsional di RSUD Provinsi NTB tahun 2020
- 1.5 Rincian Dokter Paruh Waktu RSUD Provinsi NTB tahun 2020
- 1.6 Rincian Dokter Spesialis Kontrak RSUD Provinsi NTB tahun 2020
- Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Provinsi NTB tahun 2013-2018
- 2.2 Penetapan Kinerja (PK) RSUD Provinsi NTB tahun 2020
- Tabel 3.1 Capaian Indikator Status Akreditasi RS
- 3.2 Perbandingan target, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
- 3.3 Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam RPJMD
- 3.4 Perbandingan capaian indikator kinerja dengan indikator SPM dalam Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008
- 3.5 Keselarasan antara sasaran dan program
- 3.6 Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- 3.7 Realisasi anggaran berdasarkan PK tahun 2020



EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Setiap akhir periode tahun anggaran, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK). Pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Capaian Kinerja yang dibandingkan dengan Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan teridentifikasi sejumlah ketimpangan kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Hasil pengukuran kinerja kemudian dilaporkan dalam bentuk akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis.

Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD provinsi NTB mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB.

Adapun Penetapan Kinerja RSUD Provinsi NTB tahun 2020 terdiri dari 1 sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yaitu meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan indikator kinerja Status Akreditasi Rumah Sakit. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, dari indikator kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil mempertahankan status akreditasi Rumah Sakit “Paripurna”

Demikian ringkasan eksekutif ini kami sampaikan untuk dapat memberikan gambaran sekilas tentang Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2020 dengan harapan menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak khususnya para *stakeholder* di RSUD Provinsi NTB.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara agar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Provinsi NTB sebagai organisasi perangkat daerah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Provinsi NTB Tahun 2020 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna



mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Provinsi NTB Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan seharusnya dicapai oleh RSUD Provinsi NTB serta dapat mendorong RSUD Provinsi NTB didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah RSUD Provinsi NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut RSUD Provinsi NTB berlokasi di Jalan Praburangkasari Dasan Cermen Mataram memiliki luas lahan 125.000 m² dan luas bangunan 57.206 m².

Gedung lama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Pejanggik no. 6 Mataram didirikan ± tahun 1915 merupakan gedung peninggalan pemerintah Kolonial Belanda, terletak ditengah-tengah Kota Mataram dan dibangun di atas areal tanah seluas 2,5 ha dan merupakan gedung Sekolah Dasar (HIS). Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, gedung tersebut tidak lagi dipergunakan sebagai tempat pendidikan, melainkan dipergunakan sebagai tempat Palang Merah. Beberapa waktu kemudian penggunaannya berubah sebagai Rumah Sakit (Rumah Sakit Beattrix). Antara tahun 1947-1948 nama Rumah Sakit Beattrix diubah menjadi Rumah Sakit Umum Mataram dan merupakan bagian dari Dinas Kesehatan Rakyat Lombok. Pada masa itu beberapa gedung dibangun untuk menambah/melengkapi gedung yang telah ada sesuai kebutuhan waktu itu.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 448/Pem.47/5/151 tanggal 5 Nopember 1969,



status Rumah Sakit Umum Mataram yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diubah menjadi milik dan pengelolaannya dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. Pada awal tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13/Menkes/SK/I/2005 tentang Peningkatan Kelas, terjadi perubahan status pada Rumah Sakit Umum Daerah Mataram dari Rumah Sakit Kelas B menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan. Pada tahun 2011 RSUD Provinsi NTB status pengelolaannya ditetapkan menjadi PPK-BLUD melalui Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 tahun 2011. Berdasarkan Perda No. 8 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 mengubah nomenklatur RSUD Mataram menjadi RSU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan ke dua atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomenklatur Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tugas RSUD Provinsi NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatanserta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan.



3. Fungsi RSUD Provinsi NTB

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, RSUD Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan

4. Kepegawaian

Salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang akan menggerakkan dan melaksanakan tugas organisasi. Status pegawai yang ada di RSUD Provinsi NTB saat ini dapat dilihat pada tabel 1.1 .

Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB menurut status kepegawaian dan jenis kelamin tahun 2020

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	340	512	852
2	Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)	3	2	5
3	Pegawai Non ASN	189	202	391
4	Dokter Paruh Waktu	21	17	38
5	Dokter Kontrak	7	6	13
Jumlah		556	739	1.299

Sumber : Bag. SDM

Pegawai RSUD Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas sehari-hari berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan LAKIP RSUD Provinsi NTB Tahun 2020



jabatan/ kompetensi masing-masing. Jenis jabatan yang ada di RSU Provinsi NTB, yaitu jabatan struktural (eselon), jabatan non struktural umum (fungsional umum) dan jabatan non struktural tertentu (fungsional tertentu), dengan distribusi sebagaimana pada table 1.2.

Tabel 1.2 Distribusi PNS RSUD Provinsi NTB menurut jenis jabatan dan jenis kelamin tahun 2020

No	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jml
		Laki-laki	Perempuan	
1	Struktural	21	12	33
2	Non Struktural (fungsional)			
	a. Fungsional umum	112	73	185
	b. Fungsional tertentu	215	419	634
J u m l a h		348	504	852

Sumber : Bag. SDM

Jenis Jabatan Fungsional yang ada di RSUD Provinsi NTB Tahun 2020 sebanyak 23 jenis jabatan fungsional (Jafung), yaitu :

- 1) Jabatan Fungsional Dokter
- 2) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik
- 3) Jabatan Fungsional Dokter Gigi
- 4) Jabatan Fungsional Perawat
- 5) Jabatan Fungsional Perawat Gigi
- 6) Jabatan Fungsional Psikolog
- 7) Jabatan Fungsional Bidan
- 8) Jabatan Fungsional Apoteker
- 9) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
- 10)Jabatan Fungsional Perekam Medis
- 11)Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
- 12)Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium
- 13)Jabatan Fungsional Radiografer
- 14)Jabatan Fungsional Terapis Wicara
- 15)Jabatan Fungsional Okupasi Terapi
- 16)Jabatan Fungsional Refraksionis



- 17)Jabatan Fungsional Fisikawan Medis
- 18)Jabatan Fungsional Fisioterapis
- 19)Jabatan Fungsional Nutritionis
- 20)Jabatan Fungsional Sanitarian
- 21)Jabatan Fungsional Umum
- 22)Analisis Kepegawaian
- 23)Pembimbing Kesehatan Kerja Muda

Dua puluh tiga jenis jabatan fungsional (kecuali fungsional umum) tersebut masing-masing memiliki strata yang berbeda-beda. Distribusi SDM Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2020 menurut jenis jabatan dan jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel 1.3.

Tabel 1.3 Distribusi SDM Fungsional RSUD Provinsi NTB Tahun 2020

No	Jenis Jabatan fungsional	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dokter Spesialis	26	28	54
2	Dokter Umum	15	20	35
3	Dokter Gigi	2	2	4
4	Paramedis keperawatan	100	249	349
5	Paramedis nonkeperawatan	72	120	192
J u m l a h		215	419	634

Sumber : SDM

Sebagai RS Kelas B pendidikan yang akan menuju RS Kelas A, RSUD Provinsi NTB berusaha memenuhi kebutuhan dokter, terutama dokter spesialis dan subspesialis. Menjadi RS kelas A berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit, kebutuhan dokter spesialis menjadi RS Kelas A adalah 110 orang, sementara dokter spesialis pemangku jabatan fungsional, dokter paruh waktu dan dokter spesialis kontrak yang ada saat ini di RSUD Provinsi NTB sebanyak 94 orang. Adapun rincian jenis dan jumlah dokter spesialis di RSUD Provinsi NTB tahun 2020 sebagai mana tabel 1.4.



Tabel 1.4 Rincian Dokter Spesialis RSUD Provinsi NTB Berdasarkan Spesialisasi Tahun 2020

No	Nama Spesialisasi	L	P	Jumlah Orang
1	Spesialis Anak (DSA)	2	6	8
2	Spesialis Anestesi (DSAN)	-	6	6
3	Spesialis Bedah (DSB)	6	-	6
4	Spesialis Bedah Mulut (DSBM)	-	1	1
5	Spesialis Bedah Plastik (DSBP)	-	-	-
6	Spesialis Bedah Syaraf (DSBS)	-	-	-
7	Spesialis Emergency (DSEm)	-	1	1
8	Spesialis Forensik (DSF)	1	-	1
9	Spesialis Jantung (DSJ)	-	1	1
10	Spesialis Keterapi Fisik dan Rehabilitasi (DSKFR)	-	2	2
11	Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK)	1	1	2
12	Spesialis Mata (DSM)	1	1	2
13	Spesialis Obgyn (DSOG)	5	2	7
14	Spesialis Otrhopedi (DSBO)	1	2	3
15	Spesialis Paru (DSP)	1	2	3
16	Spesialis Mikrobiologi Klinik (DSMK)	-	-	-
17	Spesialis Patologi Klinik (DSPK)	-	1	1
18	Spesialis Penyakit Dalam (DSPD)	4	-	4
19	Spesialis Radiologi (DSR)	1	1	2
20	Spesialis Syaraf (DSS)	1	1	2
21	Spesialis THT (DTHT)	1	1	2
22	Spesialis Urologi (DSU)	1	-	1
23	Spesialis Prostodonsia (DRGSP)	-	1	1
Jumlah		26	30	56

Sumber : Bag. SDM

Kekurangan dokter spesialis di RSUD Provinsi NTB telah diupayakan melalui pendidikan dokter umum ke jenjang dokter spesialis maupun dokter spesialis ke sub spesialis baik yang didanai oleh APBD Provinsi NTB, Kementerian Kesehatan dan sponsor. Program pendidikan dokter umum ke jenjang dokter spesialis maupun ke jenjang dokter spesialis ke subspesialis yang didanai oleh APBD Provinsi NTB sering terkendala oleh lamanya keluar SK Tugas Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Upaya lain yang telah dilakukan adalah dengan memberdayakan dokter-dokter spesialis Fakultas Kedokteran UNRAM sejalan RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit pengampu FK UNRAM.



Dimana di dalam distribusi SDM RSUD Provinsi NTB di sebut sebagai dokter paruh waktu. Adapun rincian dokter paruh waktu RSUD Provinsi NTB Tahun 2020, bisa dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5 Rincian Dokter Paruh Waktu RSUD Provinsi NTB Tahun 2020

No	Nama Spesialisasi	L	P	Jumlah
1	Spesialis Anak (DSA)	-	2	2
2	Spesialis Anestesi (DSAN)	-	-	-
3	Spesialis Bedah (DSB)	1	-	1
4	Spesialis Bedah Plastik (DSBP)	-	1	1
5	Spesialis Bedah Syaraf (DSBS)	2	-	2
6	Spesialis Bedah Thoraks Kardiovaskuler (DSBTK)	1	-	1
7	Spesialis Forensik (DSF)	1	-	1
8	Spesialis Jantung (DSJ)	1	1	2
9	Spesialis Kesehatan Jiwa (DSKJ)	-	1	1
10	Spesialis Kulit dan Kelamin (DSKK)	1	-	1
11	Spesialis Mata (DSM)	-	4	4
12	Spesialis Mikrobiologi Klinik (DSMK)	1	-	1
13	Spesialis Neurologi (DSN)	-	-	-
14	Spesialis Obgyn (DSOG)	2		2
15	Spesialis Orthopedi (DSBO)	-	1	1
16	Spesialis Paru (DSP)		2	2
17	Spesialis Patologi Klinik (DSPK)	1	-	1
18	Spesialis Penyakit Dalam (DSPD)	3	1	4
19	Spesialis Radiologi (DSR)	-	2	2
20	Spesialis Syaraf (DSS)	2	1	3
21	Spesialis THT (DTHT)	2	1	3
22	Spesialis Urologi (DSU)	2		2
Jumlah		20	17	37

sumber: Bag. SDM

Upaya lain untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di RSUD Provinsi NTB adalah dengan mengangkat dokter spesialis menjadi dokter spesialis kontrak dengan membebankan pada anggaran BLUD. Adapun rincian dokter spesialis dengan status kontrak adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Rincian Dokter Spesialis Kontrak Provinsi NTB Tahun 2020

No	Nama Spesialisasi	Jumlah		Total
		L	P	
1	Dokter Umum (DRU)	3	9	12
2	Spesialis Bedah (DSB)	2	-	2
3	Spesialis Mata (DSM)	1	-	1
4	Spesialis Obgyn (DSOG)	1	-	1
5	Spesialis Orthopedi (DSBO)	1	-	1
6	Spesialis Ortodontal (DRGSPO)		1	1
JUMLAH		8	11	119



5. Struktur Organisasi

Pada tahun 2020 Struktur organisasi dan tata kerja RSUD Provinsi NTB telah mengalami perubahan nomenklatur sebagai berikut: Direktur RSUD Provinsi NTB dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yaitu wakil direktur pelayanan, wakil direktur umum dan keuangan, dan wakil direktur SDM dan Diklat. Masing-masing wakil direktur dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh kepala bagian/kepala bidang, kepala seksi/kepala subbagian dan kepala instalasi yang merupakan jabatan non struktural. Disamping jabatan struktural dalam SOTK RSUD Provinsi NTB juga terdapat jabatan fungsional.

Struktur organisasi RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran RSUD Provinsi NTB dalam pembangunan daerah adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan baik di rawat jalan, rawat inap, maupun rawat darurat. Muara akhirnya adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTB sehingga mampu berdaya saing. Pelayanan yang diberikan di RSUD Provinsi NTB meliputi pelayanan medis spesialistik dan subspesialistik, pelayanan penunjang, maupun pelayanan unggulan.



Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi RSUD Provinsi NTB (masalah-masalah yang dihadapi secara internal) dan beberapa isu yang mengemuka antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan SDM RS.
2. Belum optimalnya penelitian oleh SDM RS.
3. Belum optimalnya pelayanan keperawatan.
4. Belum optimalnya pelayanan medis.
5. Belum optimalnya pelayanan penunjang.

Disamping itu terdapat juga beberapa isu-isu strategis yang merupakan isu-isu nasional, antara lain:

1. Penurunan angka *Stunting*
2. Angka kematian ibu dan bayi
3. Perbaikan pengelolaan sistem JKN.
4. Penguatan pelayanan Kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan baik fisik maupun peralatan untuk mewujudkan *customer satisfaction* melalui *medical execellence, service execellence dan finance execellence*. Upaya-upaya tersebut antara lain penambahan kapasitas Tempat Tidur menjadi 439 kapasitas tempat tidur (SK Direktur Nomor 821.29/230/RSUDP/2020), meningkatkan kompetensi petugas melalui pendidikan formal (dokter spesialis ke sub spesialis, dokter umum ke spesialis dll) maupun informal (diklat-diklat teknis) serta pengembangan pelayanan unggulan seperti pusat pelayanan jantung dan pembuluh terpadu, pusat pelayanan intervensi paru menjadi pelayanan unggulan serta menjadikan pelayanan radioterapi sebagai pelayanan unggulan.



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

A. PERENCANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 yang berisi penjabaran visi, misi dan program yang direncanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis (Renstra) tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Renstra tahun 2019 – 2023 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun kedepan.

1) VISI ,MISI, TUJUAN DAN SASARAN RSUD PROVINSI NTB

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah menjelaskan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Dari pernyataan tersebut OPD tidak lagi mencantumkan



visi dan misi perangkat daerah didalam renstra. Visi dan misi OPD mengacu kepada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang termuat didalam RPJMD.

Dalam mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah, OPD perlu merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang didalam Renstra. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

VISI : Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang

MISI	TUJUAN	SASARAN
NTB sehat dan Cerdas	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan

2) CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RSUD PROVINSI NTB 2019-2023

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui berbagai strategi dengan menetapkan kebijakan dan selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan yang selaras agar output maupun outcome sesuai dengan yang diharapkan.



1. Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta dengan mencermati isu-isu strategis RSU Provinsi NTB, maka strategi RSUD Provinsi NTB yang tertuang dalam Rencana strategik Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan medis, penunjang medis dan asuhan keperawatan
- b. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar
- c. Mengembangkan layanan unggulan sesuai kebutuhan/pola penyakit
- d. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan asuhan keperawatan
- e. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan rumah sakit berdasarkan analisa beban kerja
- f. Memastikan ketersediaan pembiayaan bagi masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan.

2. Kebijakan

Kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan standarisasi/akreditasi rumah sakit versi SNARS
- b. Mengembangkan/meningkatkan tipe rumah sakit dari tipe B pendidikan menjadi tipe A
- c. Mewujudkan dan mengembangkan layanan wisata medis
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelayanan medis, penunjang medis dan asuhan keperawatan
- e. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (alat kedokteran, obat dll) sesuai standar
- f. Pengembangan ruang isolasi bertekanan negative
- g. Pembangunan gedung layanan covid 19 dan trauma center



- h. Melaksanakan layanan kemoterapi dan radioterapi (untuk pelayanan pasien dengan kanker), pemeriksaan swab PCR untuk covid 19 dan UTDRS
- i. Melaksanakan layanan isolasi sesuai protokol penanganan covid-19
- j. Mengembangkan RS Darurat covid-19 berkoordinasi dengan Dikes Prov NTB untuk pasien positif tanpa gejala s/d gejala ringan
- k. Mengembangkan simkes yang terintegrasi dengan SIM-RS
- l. Meningkatkan kompetensi petugas melalui:
 - Pelatihan keterampilan di unit khusus (ICU/ICCU,PICU/RICU,NICU,IBS/OK Cyto, Anasthesi, Chatlab, Intermediet/HCU,HD,IGD)
 - Pelatihan keterampilan petugas ruang isolasi ttg penanganan covid 19
 - Meningkatkan jenjang Pendidikan formal
 - Melaksanakan test kebugaran untuk karyawan rumah sakit
- m. Melakukan rekredensial bagi tenaga kesehatan sebelum melaksanakan tugas
- n. Melakukan rekrutment tenaga untuk memenuhi kebutuhan
- o. Mengusulkan anggaran pembiayaan bagi masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan dalam APBD
- p. Melaksanakan kerjasama (MOU) dengan kabupaten/kota untuk jaminan pembiayaan (Bansos, Jampsal dll)

3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan melaksanakan program dan kegiatan. Program yang ditetapkan oleh RSUD Provinsi NTB mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi



Nusa Tenggara Barat dan Permendagri 13/2016 Adapun program-program tersebut adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Capaian Kinerja
- e. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- j. Program Pegadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
- k. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
- l. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Provinsi NTB tahun 2020 adalah :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 1. Kegiatan pengadaan mobil jabatan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- d. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah



1. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
- e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 1. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- f. Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular
 1. Kegiatan peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (ide) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 1. Penyusunan Standart Pelayanan Kesehatan
- h. Program Pengadaan; peningkatan sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata
 1. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS
 2. Pengadaan obat-obatan
 3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS
- i. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
 1. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

3) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama berfungsi Untuk memantau pencapaian sasaran strategis dan arah kebijakan RSUD Provinsi NTB yang harus dicapai sampai dengan akhir periode renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Provinsi NTB adalah:

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Status akreditasi rumah sakit	paripurna

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra



SKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang pada akhirnya di fokuskan pada Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan
2. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis yang ingin dicapai
3. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan
4. Jumlah Anggaran yang mendukung program dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2020 terdiri dari sasaran strategis yang ingin dicapai, indikator kinerja, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2.2 Penetapan Kinerja (PK) RSUD Provinsi NTB Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Statutus Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna

Mengacu pada Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, sasaran strategis dan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja (PK) RSUD Provinsi NTB tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan

Sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB selalu berusaha dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk menunjang kualitas layanan kepada masyarakat Rumah sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu berbenah baik dari sisi kelengkapan sarana dan prasarana, juga dari sikap dan perilaku karyawan harus mencerminkan profesionalisme dan mempunyai komitmen tinggi terhadap tugas dan kewajibannya. Adapun salah satu indikator untuk menilai kualitas pelayanan RS adalah kepuasan masyarakat/pelanggan.



Kepuasan masyarakat/pelanggan merupakan cerminan kualitas pelayanan kesehatan yang di terima oleh pasien. Mutu pelayanan kesehatan merujuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin sempurna kepuasan tersebut, makin baik pula kualitas/mutu pelayanan kesehatan. Namun demikian salah satu cara yang bisa digunakan untuk menilai peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat adalah dengan melakukan survey kepuasan. Hasil survey kepuasan pelanggan tidak hanya akan berhenti pada deretan angka-angka yang dihasilkan, tapi menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang holistik di Rumah Sakit. Dengan meningkatnya kepuasan pelanggan diharapkan jumlah kunjungan ke Rumah Sakit akan meningkat.

Setiap waktu RSUD Provinsi NTB berusaha memberikan pelayanan secara profesional kepada seluruh lapisan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, maupun ras termasuk kepada masyarakat tidak mampu. Hal ini sejalan dengan program Kementerian Kesehatan RI yakni penguatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Cakupan kesehatan semesta bermakna bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif) yang berkualitas, efektif sesuai kebutuhan dan tidak boleh ada kendala biaya dalam memanfaatkan pelayanan tersebut. Untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan inovasi dan komitmen dari seluruh civitas hospitalia.

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, maka RS wajib melaksanakan akreditasi RS setiap 3 (tiga) tahun sekali dan reakreditasi rumah sakit setiap tahun . Hal ini tercantum didalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi ini wajib dilakukan oleh semua RS baik rumah sakit publik/pemerintah maupun rumah sakit privat/swasta/BUMN.



Dalam menunjang keberhasilan akreditasi untuk meraih predikat paripurna, diperlukan keterlibatan semua unsur dan komitmen bersama, baik SDM, perencanaan, keuangan maupun bidang non teknis lainnya. SDM merupakan salah satu unsur yang penting didalam penilaian akreditasi Rumah Sakit. Dalam penilaian akreditasi, RSUD Provinsi NTB dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima. Pelayanan Prima salah satunya bisa dicapai apabila SDM yang ada berkualitas. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan pendidikan dan atau pelatihan, baik secara formal maupun non formal yang dilakukan secara terus menerus. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai/karyawan agar meningkatkan kesadaran karyawan/pegawai untuk dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, mempunyai keahlian dan keterampilan dibidangnya masing-masing (teknis) sehingga mampu memberikan pelayanan secara efektif, efisien, dan safety. Berdasarkan hal ini RSUD Provinsi NTB selalu berikhtiar menerapkan '*the right man in the right place*', artinya menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa bekerja dengan optimal.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Tahun 2020.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 yang merupakan reviu dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 29 Tahun 2010, kinerja RSUD Provinsi NTB diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah diimplementasikan dalam program/kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja RSUD Provinsi NTB dilakukan berdasarkan pada realisasi pencapaian indikator dan target program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023, Renja 2020 dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 2020 dengan cara membandingkan antara capaian tahun 2020 dengan indikator kinerja Tahun 2020 dan terhadap target akhir RPJMD.

Capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 di jelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.



Pada tahun 2020 RSUD menetapkan sasaran strategis yaitu "**Meningkatnya kualitas layanan kesehatan**" Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, RSUD Provinsi NTB menetapkan indikator kinerja yaitu Status Akreditasi Rumah Sakit, capaian indikator dari sasaran tersebut adalah:

a) Capaian Indikator Status Akreditasi Rumah Sakit

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan/mutu pelayanan dan menjamin patient safety (keselamatan pasien), maka RS wajib melaksanakan akreditasi RS setiap 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini tercantum didalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali dan evaluasi Akreditasi setiap tahun. Akreditasi ini wajib dilakukan oleh semua RS baik rumah sakit publik/pemerintah maupun rumah sakit privat/swasta/BUMN. Adapun capaian indikator kinerja status akreditasi RS adalah :

Table 3.1. Capaian Indikator Kinerja Status Akreditasi Rumah Sakit.

Indikator kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	% capaian realisasi 2020
1	2	3	4	5
Status akreditasi rumah sakit	Paripurna	Paripurna	paripurna	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa RSUD Provinsi selalu mampu mempertahankan predikat paripurna. Untuk menunjang keberhasilan akreditasi dalam meraih predikat paripurna, diperlukan keterlibatan semua unsur dan komitmen bersama, baik SDM, perencanaan, keuangan maupun bidang non teknis lainnya. Didalam penilaian akreditasi, RSUD Provinsi NTB dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima sesuai dengan standart akreditasi yang telah ditetapkan oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit). Pelayanan Prima salah satunya bisa dicapai apabila SDM yang ada berkualitas. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan pendidikan dan atau



pelatihan, baik secara formal maupun non formal yang dilakukan secara kontinyu dan terus menerus. Kegiatan ini ditujukan kepada pegawai/karyawan agar meningkatkan kesadaran karyawan/pegawai untuk dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, mempunyai keahlian dan keterampilan dibidangnya masing-masing (teknis) sehingga mampu memberikan pelayanan secara efektif, efisien, dan safety. Berdasarkan hal ini RSUD Provinsi NTB selalu berikhtiar menerapkan '*the right man in the right place*', artinya menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa bekerja dengan optimal.

Selain ditunjang oleh kemampuan Skill SDM yang mumpuni, keberhasilan RSUD Provinsi NTB dalam meraih predikat paripurna juga ditunjang oleh ketersedian alat-alat kesehatan yang canggih, sarana dan prasarana yang lengkap serta kecepatan merespon dalam menaggulangi masalah-masalah yang ada.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.2 Perbandingan target, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target			2018	2019	2020	Realisasi		Capaian (%)			
			2018	2019	2020				2018	2019	2020	2018	2019	2020
Menigkatnya kualitas layanan kesehatan	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	100	100	100									

Bila dilihat dari tabel 3.2, capaian realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan capaian indikator status akreditasi rumah sakit Paripurna menunjukkan bahwa sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan kesehatan dapat tercapai walaupun masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkat dan dibenahi, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh RSUD Provinsi NTB kepada pasien yang datang berkunjung ke RSUD Provinsi NTB semakin baik. RSUD Provinsi NTB selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.



Peningkatan terhadap hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kerja keras semua bidang, instalasi dan unit. Harapan kedepannya RSUD Provinsi NTB semakin meningkat kinerjanya sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

3. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan target dalam RPJMD

RSUD Provinsi NTB merupakan SKPD pendukung indikator utama RPJMD 2019-2023. Adapun capaian indikator kinerja yang mendukung RPJMD dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.3. Perbandingan indikator kinerja dengan target dalam RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target Kinerja s.d Periode akhir RPJMD	Target tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	%
Menigkatnya kualitas layanan kesehatan	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 masih mendapatkan status akreditasi paripurna yang ditetapkan komisi Akreditasi Rumah Sakit yang berarti bahwa setelah dinilai rumah sakit memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Standar pelayanan rumah sakit adalah semua standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit antara lain standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.

Realisasi pagu anggaran yang bersumber dari dana Sudsidi APBD untuk kegiatan akreditasi rumah sakit pada tahun 2020 adalah 100%. Pada akhir tahun periode RPJMD diharapkan seluruh sasaran strategis dapat terealisasi 100% melalui program dan kegiatan yang selaras dan berkesinambungan.

4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Target Nasional

Untuk membandingkan indikator kinerja RS dengan target nasional, RSUD Provinsi NTB menggunakan SPM Kementerian Kesehatan sesuai



dengan Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang SPM RS. Sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RS memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, RS dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standart yang ditetapkan. Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit. Standart Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Indikator SPM merupakan tolak ukur untuk keberhasilan sasaran yang hendak dicapai didalam pencapaian SPM.

RSUD Provinsi NTB melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah berdasarkan SPM. Adapun SPM RSUD Provinsi NTB sudah sesuai dengan Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008. Capaian indikator kinerja RSUD Provinsi NTB tahun 2020 dibandingkan dengan indikator SPM dalam permenkes 129/Menkes/SK/II/2008 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Indikator SPM dalam Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dalam Kemenkes 2018 tahun 2020	Indikator Kinerja RSUD Provinsi NTB	Realisasi Kinerja RSUDP NTB tahun 2020
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	Status akreditasi rumah sakit	Paripurna

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja rumah sakit dengan indikator status akreditasi rumah sakit merupakan bagian dari indikator sasaran kemenkes RPJMN 2020 – 2024.

RSUD Provinsi NTB telah memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk juga kepada masyarakat miskin/tidak mampu. Dalam program Kementerian Kesehatan RI dijelaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan diberikan menuju cakupan kesehatan semesta.



Cakupan Kesehatan Semesta bermakna bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif) yang berkualitas, efektif sesuai kebutuhan dan tidak boleh ada kendala biaya dalam memanfaatkan pelayanan tersebut. Hal ini juga lebih lanjut dijelaskan didalam Indikator SPM dalam Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 bahwa tidak boleh ada pasien yang diharuskan membayar uang muka dan pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan harus terlayani 100%.

5. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, indikator kinerja tahun 2020 yaitu status akreditasi rumah sakit Paripurna dapat diraih dengan komitmen yang kuat dari seluruh karyawan/ti RSUD Provinsi NTB dan dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB . Secara umum faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Kebijakan dan Program serta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengembangan RS antara lain pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan/kedokteran.
- b. Koordinasi antar bidang/unit/instalasi yang ada di RSUD Provinsi NTB
- c. Adanya kerjasama dengan berbagai institusi/ lembaga
- d. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional dan jaminan asuransi kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan di RSUD Provinsi NTB.
- e. Sebagai RS Pusat Rujukan tertinggi di Provinsi NTB
- f. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- g. Adanya komitmen Manajemen terhadap pengembangan pelayanan Rumah Sakit



- h. Tersedianya SDM Rumah Sakit yang cukup kompeten dan siap dalam memberikan pelayanan kesehatan serta pengembangan pelayanan Rumah Sakit

Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala bagi capaian kinerja RSUD Provinsi NTB Tahun 2020 adalah:

- a. Tidak tersedianya anggaran yang merupakan dukungan subsidi APBD untuk program pemeliharaan RS
- b. Terbatasnya pelaksana dan anggaran untuk peningkatan kompetensi khusus dan kegiatan pelatihan minimal 20 jam pelatihan bagi seluruh ASN di RSUD Provinsi NTB.
- c. Belum tersedianya anggaran untuk melanjutkan pembangunan Gedung Trauma Center dan Covid-19
- d. Berdasarkan analisa kebutuhan tenaga yang dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB dibandingkan dengan trend kenaikan jumlah kunjungan dan pengembangan layanan, RSUD Provinsi NTB masih kekurangan tenaga profesi kesehatan sehingga berpengaruh terhadap waktu tunggu pelayanan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Koordinasi dengan profesi kesehatan terkait dalam pelaksanaan pelatihan fungsional dan bekerjasama dengan RSCM sebagai sister hospital.
- b. Melakukan koordinasi berkesinambungan dengan berbagai pihak melalui pertemuan *Show Cause Meeting* (SCM) antara berbagai pihak yang terkait.
- c. Melaksanakan rekrutmen pegawai non PNS.

Alternatif solusi untuk perbaikan kinerja kedepan adalah:

- a. Mengidentifikasi jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh unit/instalasi/bidang untuk rencana kebutuhan pelatihan selama 5 tahun kedepan.



- b. Tetap berkoordinasi secara berkesinambungan dengan instansi terkait untuk pengalokasian anggaran
 - c. Melakukan evaluasi kinerja bagi seluruh karyawan di RSUD Provinsi NTB
6. Efisiensi penggunaan sumber daya

Program-program yang dilaksanakan pada RSUD Provinsi NTB merupakan program-program yang berkaitan langsung dengan sasaran yang akan dicapai. Program-program yang dilaksanakan ditahun 2020 masih sesuai dengan tugas fungsi RS. Program-program yang dilaksanakan efektif dalam rangka pencapaian keselarasan program dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Keselarasan antara sasaran dan program

NO	SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan; Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Mata Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Dari sasaran strategi meningkatnya kualitas layanan kesehatan tersebut ada beberapa program yang selaras dengan sasaran strategis tersebut, antara lain :

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Dengan adanya program ini RS mampu meningkatkan kualitas SDM RS sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan harapan semakin meningkatnya jumlah SDM RS yang terpapar dengan kegiatan pendidikan formal dan pelatihan maka semakin berkualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Program ini sudah selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh RS.



- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya kesehatan masyarakat ini selaras juga dengan program kementerian kesehatan RI yaitu cakupan kesehatan semesta. Program kementerian kesehatan RI ini mengharapkan pelayanan yang diberikan oleh RS tanpa uang muka dan semua masyarakat miskin terlayani semua. Hal ini tentunya selaras dengan sasaran strategis yang sudah ditetapkan oleh RS. Untuk mendukung hal tersebut, RS menetapkan program/kegiatan upaya kesehatan masyarakat dimana kegiatan dari program tersebut adalah peningkatan dan penanggulangan masalah kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Salah satu upaya yang ditempuh oleh RS untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan melakukan akreditasi oleh KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit). Akreditasi ini wajib dilakukan oleh semua RS, baik pemerintah maupun swasta minimal 3 tahun sekali. dan reakreditasi setiap tahun.

Dengan adanya program ini, RS mampu meningkatkan kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal ini terbukti RS selalu bisa mempertahankan predikat akreditasi RS "PARIPURNA".

- Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana RS merupakan program yang sangat strategis di RS. Dengan adanya program ini, RS mampu mengadakan alat kedokteran/kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi dari penggunaan anggaran pada program pengadaan merupakan efisiensi dari penawaran nilai kontrak.

- Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD merupakan salah satu program yang sangat strategis di RS. Program ini mendukung beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh RS. Hal ini dikarenakan anggaran BLUD sangat fleksibel. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis, anggaran program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD digunakan untuk membiayai biaya operasional, biaya umum dan



administrasi, dan biaya pengeluaran investasi. Sebagai contoh berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan tenaga, RS masih kekurangan tenaga kesehatan. Oleh karena itu RS telah melaksanakan rekrutmen tenaga dengan membebankan pada anggaran BLUD. Selain itu, RS melakukan KSO dengan pihak ketiga terhadap beberapa alat-alat untuk mengurangi beban kerja yang berlebih dari SDM. Hal ini tentunya memiliki makna RS telah memaksimalkan fungsi alat-alat canggih yang tersedia di Rumah Sakit sehingga mengurangi beban kerja SDM.

Terjadinya pandemi covid -19 Pada tahun 2020 menyebabkan terjadi revocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 yaitu program/kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin, RSU Daerah Provinsi NTB mendapatkan Dana BTT yang digunakan untuk Penanggulangan Covid-19 yang diperuntukkan untuk Pembuatan Ruang Isolasi, Alat Kesehatan, Alat Kesehatan dan Reagen PCR, Unit Sumbawa Technopark, APD, Pengadaan CCTV, Rapid Test, VTM (Viral Transport Media), Linen, uang lelah, Extra Fooding, Desinfektasi Sarana Umum, Sarana dan prasarana, perbaikan Ruang Isolasi, Ruang operasi bertekanan negative, Pengadaan vitamin/suplemen, Peti jenazah, pembuatan ruang isolasi bertekanan negative, media informasi dan promosi/edukasi, bahan habis pakai, alat komunikasi dan Rehab ruang pemeriksaan sampel

7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja.

Semua program selalu berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja di RSUD Provinsi NTB. Namun program/kegiatan yang sangat menunjang dalam keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu:



Tabel 3.6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Status akreditasi Rumah Sakit	Standarisasi Pelayanan kesehatan	Penyusunan pelayanan standar kesehatan

Capaian kinerja RSUD Provinsi NTB pada tahun 2020 didukung dengan pemanfaatan anggaran (realisasi) sebesar Rp. 383.303.354.164 atau sebesar 94,45% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 405.820.914.064,67.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2020 yang menunjang kegiatan selama tahun 2020 untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah sebagai berikut;



Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Berdasarkan PK tahun 2020

Sasaran Strategis	Program Kegiatan	Anggaran		% Keu	% Fisik
		Pagu	Realisasi		
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	430.397.374	429,030,120	99,68	38
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	124,100,000	96,600,000	77.84	122
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	478,025,630	478,025,630	100.00	100
	Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata	61,440,568,828	59,003,981,381	96.08	100
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	173,891,947,443	245,359,671,956	141.10	100



Dari Tabel 3.7 atas dapat dilihat bahwa pencapaian dari sasaran strategis terhadap realisasi keuangan masing-masing program/kegiatan berbeda-beda. Program upaya kesehatan masyarakat terealisasi sebesar Rp. 429.030.120,- (99,68%) dari pagu sebesar Rp. 430.397.374,- dengan realisasi fisik 38% (264 orang) dari target 700 orang pada tahun 2020 dimana program kegiatan ini ditujukan pada pelayanan kesehatan bagi korban bencana, penanggulangan pada masalah kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien tidak mampu, terlantar dan masalah sosial lainnya, selain itu juga diperuntukkan bagi operasional rumah singgah dan pelayanan ambulance..

Untuk program kedua program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular realisasi keuangan sebesar 77,84% dan realisasi fisik 122% yaitu 110 pasien dari target 90 pasien. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 27.500.000,-. Program/kegiatan ini diperuntukkan bagi penderita HIV-AIDS, dengan harapan masyarakat maupun penderita bisa melakukan pencegahan dan penularan terhadap penyakit HIV-AIDS. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang sasaran strategis ini antara lain: pelatihan/workshop bagi perawat dan bidan, pemeriksaan lab viral-load, pemeriksaan Meso ARV dan Pra ARV, pertemuan rutin dengan tim HIV-AIDS, dan penguatan jejaring kerja layanan KTH/PDP.

Program ketiga yaitu Standarisasi pelayanan kesehatan terealisasi 100% (Rp. 478,025,630) dari pagu anggaran Rp. 478,025,630 dengan realisasi fisik 100% . RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan reakreditasi KARS Versi 1.0 dengan hasil paripurna.

Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata realisasi keuangan 96,08% dan realisasi fisik sebesar 100%. Dengan adanya program ini RSUD Provinsi NTB mampu membeli alat kesehatan/kedokteran sebanyak 396 unit alat yang bersumber dari Dana DAK dan DBCHT. Dengan jumlah alat yang banyak tentunya biaya operasional alat juga akan bertambah. Di tahun 2020, RSUD Provinsi NTB



mendapatkan subsidi untuk biaya listrik, air dan telepon namun masih belum mencukupi untuk biaya operasional alat-alat canggih yang ada di RS.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dengan realisasi keuangan sebesar 141% (Rp. 245,359,671,956) dari target PK sebesar Rp. 173,891,947,443 dan realisasi fisik 100%. Adapun realisasi pendapatan BLUD tahun 2020 sebesar Rp. 288.677.982.256,23 (166.01%). Kegiatan yang dibiayai dalam program ini antara lain digunakan untuk biaya operasional (biaya pelayanan, biaya umum dan administrasi, dan biaya pengeluaran investasi).

C. PENGHARGAAN ATAS KINERJA OPD

Selama kurun waktu tahun 2020, RSUD Provinsi NTB telah mendapatkan penghargaan sebagai berikut:

1. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 untuk Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua.
Penghargaan ini diberikan oleh BPJS ketenagakerjaan yang diberikan langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Desember 2020
2. Sebagai Badan Publik Informatif Kategori OPD Provinsi NTB pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB.

Penghargaan ini merupakan penghargaan dibidang keterbukaan informasi. Penetapan penghargaan ini diberikan setelah web RSUD divisitasi dan dinilai oleh komisi informasi NTB dan dinyatakan sebagai badan publik terinformatif. Penilaian ini diikuti oleh seluruh OPD di NTB, parpol, OPD vertikal di NTB. Beberapa hal yang dilakukan sehingga RSUD meraih penghargaan ini, antara lain : peran serta dari pimpinan sangat aktif terhadap progres kerja PPID, melengkapi dokumen informasi dan mengklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi, memenuhi permintaan dari pemohon informasi publik sebelum batas waktu dan meminimalkan adanya komplain dari masyarakat terhadap pemenuhan dokumen (sesuai dengan UU KIP yang berlaku).



3. Sebagai OPD Wajib Pajak Berkontribusi Signifikan Tahun 2019 oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Barat tanggal 12 Februari 2020
4. Sebagai *Customer Loyalty Award* Tahun 2020 dari PLN UIW Nusa Tenggara Barat



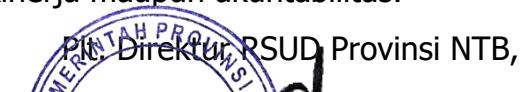
BAB IV PENUTUP

Dari hasil kajian terhadap dokumen perjanjian kinerja, maka dapat diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan RSUD Provinsi NTB serta perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dari hasil monitoring yang dilakukan atas pencapaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, dari sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan kesehatan dengan indikator status akreditasi rumah sakit "Paripurna" telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2020.

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja RSUD Provinsi NTB dimasa yang akan datang antara lain: koordinasi dengan Komisi Akreditasi Rumah Sakit, profesi kesehatan terkait dalam pelaksanaan pelatihan fungsional dan meningkatkan bekerjasama dengan RSCM sebagai sister hospital sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan, melaksanakan koordinasi yang berkesinambungan dengan unit-unit yang ada di RSUD Provinsi NTB terkait pelaksanaan kegiatan di RSUD, koordinasi yang lebih intens dengan OPD lainnya terkait pengalokasian anggaran.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, RSUD Provinsi NTB memanfaatkan hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja terutama meningkatkan kualitas layanan RSUD Provinsi NTB baik itu dari sisi peningkatan pemenuhan alat kesehatan/kedokteran sesuai standar, meningkatkan kompetensi SDM fungsional, perbaikan terhadap perencanaan dan penganggaran. Laporan kinerja tahun 2020 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja RSUD Provinsi NTB secara memadai kepada publik, baik terhadap kinerja maupun akuntabilitas.

Direktur RSUD Provinsi NTB,
dr. Nurhandini Elta Dewi, Sp.A, MPH


dr. Nurhandini Elta Dewi, Sp.A, MPH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196306231988032007

1. Sebagai Badan Publik Informatif Kategori OPD Provinsi NTB pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB.



2. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 untuk Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua.

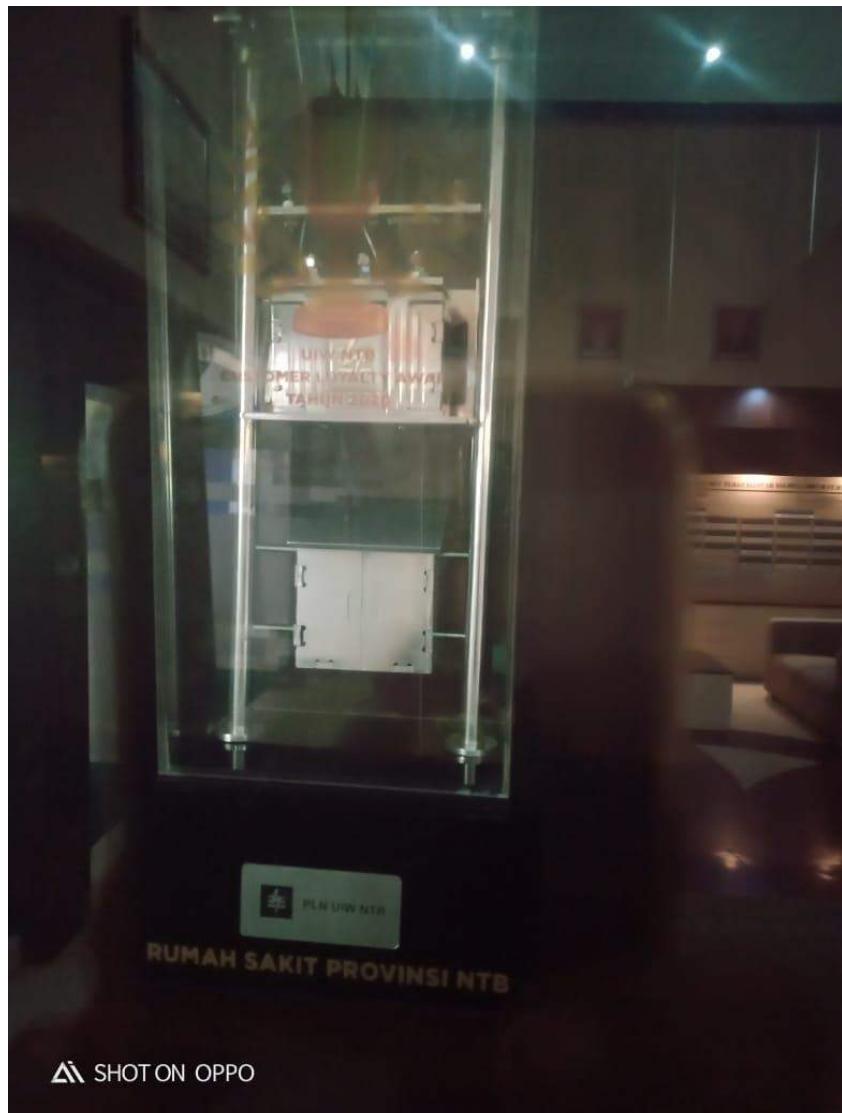


3. Sebagai OPD wajib Pajak Berkontribusi Signifikan Tahun 2019 oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Barat tanggal 12 Februari 2020



4. Sebagai Customer Loyalty Award Tahun 2020 dari PLN UIW Nusa Tenggara Barat





▲ SHOT ON OPPO



Danrem 162/Wira Bhakti

dengan ini memberikan

Piagam Penghargaan

kepada

TIM PARA MEDIS

Diberikan penghargaan setinggi-tingginya

atas peran serta dalam penanganan

Pandemi Covid-19 di wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Barat



Mataram, 18 September 2020

Komandan Korem 162/Wira Bhakti,

Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han
Brigadir Jenderal TNI